



RENCANA KERJA TAHUN 2016



DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam 1 (satu) tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dan untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Melalui Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ini pula diharapkan dapat bermakna strategis dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan dengan disertai sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016.

Semoga Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.

Surabaya, Juli 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
Bab I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Kerja	7
Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Capaian Kinerja Tahun Lalu Serta Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	18
2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi	20
2.3.2 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur	21
2.3.3 Formulasi Isu-Isu Penting	24
2.3.4 Strategi dan Kebijakan	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	41
3.1 Tujuan dan Sasaran	41
3.3 Program dan Kegiatan	45
BAB IV : PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun s/d Tahun Anggaran 2014	14
Tabel 2.3	Rekapitulasi Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014	16
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016	27
Tabel 3.1	Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem perencanaan pembangunan di Republik Indonesia menganut pada peraturan perundangan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008. Tujuan dari disusunnya dokumen perencanaan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai panduan/kerangka acuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya diberikan kepada Pemerintah Daerah. Adapun jenis dokumen perencanaan yang harus disusun sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Nasional meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang menyusunnya berpedoman kepada RPJP Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Ditinjau dari skala waktunya dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan akumulasi program kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dokumen perencanaan tahunan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan jangka menengah, dimana dokumen perencanaan tahunan merupakan implementasi tahun ke-n dari dokumen perencanaan jangka menengah. Sebagai bentuk sinkronisasi antar dokumen perencanaan, maka Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 selain itu sebagai bentuk koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas antar dokumen perencanaan tahunan maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 juga berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. Selain sinergitas antar dokumen perencanaan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi perencanaan dengan penganggaran, sehingga dengan perencanaan yang baik diharapkan deviasi antara perencanaan dengan penganggaran tidak terlalu besar.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 19. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 adalah untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sekaligus

menjadi pedoman pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama di dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 dan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan;
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- c. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;
- d. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas serta keselarasan program dan kegiatan dengan penganggaran;
- e. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;
- f. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN RENCANA KERJA

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan secara ringkas tentang Renja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Memuat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

- 1.3 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU SERTA DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Review terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 (tahun lalu) adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, dimana pada Renstra tersebut jumlah Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah 6 Program dan 46 kegiatan. Terhadap hasil evaluasi kinerja dapat ditelaah dari capaian–capaian target-target yang telah ditetapkan baik pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2014 maupun terhadap Rencana Strategis (Renstra), untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah. Evaluasi ditekankan kepada pencapaian kinerja terhadap berbagai indikator yang dapat menunjukkan *progress* pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan pencapaian dari implementasi Program dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Capaian Indikator Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah representasi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 oleh karena itu titik tolak evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut mengacu kepada indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tersebut. Pencapaian terhadap target Renstra Tahun Terakhir (2014) Secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan)
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp) *	Rasio Capaian (%)
A.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	39.775.856.710,00	26.384.125.772,00	66,33
1	<i>Peningkatan Pendapatan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah</i>	10.102.870.000,00	6.057.860.752,00	59,96
2	<i>Peningkatan Kinerja Operasional</i>	1.003.340.000,00	389.347.100,00	38,81
3	<i>Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait</i>	1.406.440.000,00	1.017.352.490,00	72,34
4	<i>Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)</i>	157.612.500,00	49.733.320,00	31,55
5	<i>Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan</i>	595.180.000,00	472.642.400,00	79,41
6	<i>Peningkatan Pengembangan Kelembagaan</i>	1.404.650.000,00	975.502.454,00	69,45
7	<i>Peningkatan Pelayanan Publik</i>	5.712.580.000,00	3.937.759.142,00	68,93
8	<i>Peningkatan Kinerja Pelayanan</i>	451.980.000,00	385.280.600,00	85,24
9	<i>Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah</i>	994.310.000,00	668.502.200,00	67,23
10	<i>Pengembangan Pusat Pengolahan Data</i>	2.757.445.000,00	2.349.066.500,00	85,19
11	<i>Analisis dan Evaluasi Kinerja</i>	2.905.200.000,00	1.193.891.058,00	41,09
12	<i>Pengembangan dan Perbaikan Sarana/Prasarana Kelembagaan</i>	4.137.839.210,00	2.883.295.800,00	69,68
13	<i>Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah</i>	1.294.300.000,00	825.837.500,00	63,81
14	<i>Pengelolaan Data Pendapatan Daerah</i>	1.754.380.000,00	1.225.029.630,00	69,83
16	<i>Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD</i>	921.580.000,00	450.009.500,00	48,83
16	<i>Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD</i>	4.176.150.000,00	3.503.015.326,00	83,88

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rasio Capaian (%)
B.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	137.393.089.600,00	115.036.770.781,00	83,73
1	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	30.358.000.000,00	28.302.992.748,00	93,23
2	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	15.168.200.000,00	13.688.598.406,00	90,25
3	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional</i>	220.185.000,00	220.185.000,00	100,00
4	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	8.198.660.000,00	6.515.815.037,00	79,47
5	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	7.579.756.400,00	6.769.691.850,00	89,31
6	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	5.098.301.275,00	4.339.171.537,00	85,11
7	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	19.110.882.925,00	11.478.780.110,00	60,06
8	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor</i>	757.839.000,00	574.642.860,00	75,83
9	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	264.300.000,00	236.121.915,00	89,34
10	<i>Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan</i>	815.000.000,00	497.557.100,00	61,05
11	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	1.245.375.000,00	994.731.250,00	79,87
12	<i>Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	676.500.000,00	223.080.640,00	32,98
13	<i>Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>	12.813.750.000,00	7.772.170.382,00	60,65
14	<i>Penyediaan Jasa Kantor</i>	35.086.340.000,00	33.423.231.946,00	95,26
C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	59.756.565.690,00	48.440.767.698,39	81,06
1	<i>Pengadaan kendaran dinas/operasional</i>	4.669.000.000,00	4.185.662.500,00	89,65
2	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas</i>	625.690.300,00	383.087.500,00	61,23
3	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor</i>	22.093.426.140,00	19.116.238.290,39	86,52
4	<i>Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional</i>	5.980.980.750,00	4.634.872.617,00	77,49

NO	Program/Kegiatan	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Rasio Capaian (%)
5	<i>Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	16.466.375.900,00	13.527.282.100,00	82,15
6	<i>Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik</i>	2.072.700.000,00	743.697.371,00	35,88
7	<i>Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu</i>	1.431.630.000,00	1.112.515.695,00	77,71
8	<i>Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga</i>	6.416.762.600,00	4.737.411.625,00	73,83
D.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.550.925.000,00	3.023.775.200,00	85,15
1	<i>Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan</i>	3.550.925.000,00	3.023.775.200,00	85,15
E.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	32.145.175.000,00	29.315.952.815,00	91,20
1	<i>Pendidikan dan pelatihan formal</i>	2.611.025.000,00	1.866.469.315,00	71,48
2	<i>Sosialisasi peraturan perundang – undangan</i>	4.162.850.000,00	3.256.003.350,00	78,22
3	<i>Penyediaan Jasa Tenaga Outsourcing</i>	22.462.550.000,00	22.135.511.000,00	98,54
4	<i>Rapat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	1.973.080.000,00	1.409.480.000,00	71,44
5	<i>Peningkatan Kompetensi Bidang Aparatur</i>	935.670.000,00	648.489.150,00	69,31
F.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00
1.	<i>Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur</i>	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 ditentukan dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun bersangkutan. Secara umum program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran Tahun 2014 adalah seperti tertera pada **Tabel 2.1** di atas, bahwa (dari keenam Program yang telah diimplementasikan) untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah rasio capaiannya sebesar 66,33%, Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran rasio capaiannya sebesar 83,73%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur rasio capaiannya sebesar 81,06%, Program Peningkatan Disiplin Aparatur rasio capaiannya 85,15% dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur rasio capaiannya 91,20% serta Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah rasio capaiannya sebesar 100%. Sehingga rata-rata rasio capaian program selama Tahun Anggaran 2014 adalah 81,49%.

Sedangkan untuk perkiraan capaian kinerja Tahun 2015 (Tahun Berjalan) terdapat beberapa perubahan, utamanya terhadap Rencana Kerja Tahun 2014, mengingat dokumen Rencana Strategis yang digunakan adalah Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 yang melaksanakan 5 Program dan 57 kegiatan. Sehingga Evaluasi capaian kinerja tahun 2015, merupakan evaluasi tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Secara umum perkiraan capaian kinerja tahun 2015 adalah 94.60, %, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut: untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah perkiraan rasio capaiannya sebesar 99,00%, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran perkiraan rasio capaiannya sebesar 95,00%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur perkiraan rasio capaiannya sebesar 90,00%, Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah rasio capaiannya 90,00% dan yang terakhir adalah Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan perkiraan rasio capaian sebesar 99,00%.

Terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, berikut disajikan capaian kinerja dalam kurun waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2014 untuk 4 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Secara umum kinerja telah mencapai sasaran atau target yang diharapkan. Berikut adalah uraian tentang Realisasi Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur (dengan Indikator Kinerja Utama sesuai Tugas dan Fungsi) sampai dengan Tahun Anggaran 2014. Rincian Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan
Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Performance Gap				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1. Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	22.00%	21.99%	7.13%	20.36%	22.43%	338.46%	338.31%	109.69%	313.23%	345.08%
2. Persentase Penurunan Tunggakan (Piutang) PKB dari Tahun Dasar Renstra	85%	3.75%	3.75%	3.75%	3.75%	85.52%	1.94%	4.52%	1.08%	3.75%	100.61%	51.73%	120.53%	28.80%	100.00%
1. Peningkatan Nilai IKM	83.50	84.00	84.50	85.00	85.00	84.41	85.06	86.19	88.29	88.18%	101.09%	101.26%	102.00%	104.49%	1.04%
2. Jumlah KB. Samsat yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013) menunjukkan Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2010 persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 22% dari persentase penerimaan PAD Tahun 2009, pada Tahun 2011 menjadi sebesar 21,99%, pada Tahun 2012 sebesar 7,13% dan Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 20,36%. Pada tahun 2014 diperoleh persentase kenaikan penerimaan PAD sebesar 22.43%. Secara keseluruhan penerimaan PAD telah melampaui target dari target sebesar 6,50% setiap tahunnya.

Sedangkan Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari saldo Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) awal tahun (*base line* tahun 2009) juga menunjukkan jumlah yang cukup signifikan yaitu pada Tahun 2010 tercapai penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 85,52%, pada Tahun 2011 sebesar 87,46%, pada Tahun

2012 menjadi sebesar 91,98% dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 93,06%. Untuk tahun 2014 penurunan piutang tunggakan tahun tetap 2009 telah mencapai 100%.

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2010 sampai dengan tahun 2014) menunjukkan peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu pada Tahun 2010 sebesar 84,41 menjadi 85,06 pada Tahun 2011, dan pada Tahun 2012 naik menjadi sebesar 86,19 serta pada Tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 88,29. Pada akhir tahun 2014 diperoleh skor IKM sebesar 88,18.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Jumlah Kantor Bersama (KB) Samsat yang berstandar atau telah melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dari target awal 48 (empat puluh delapan) KB Samsat. pada tahun 2010 capaian kinerjanya adalah sebesar 100% atau 48 KB Samsat berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008, kemudian pada tahun 2011 capaian kinerja dapat dipertahankan sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2012 capaian kinerjanya sebesar 100%, dan akhirnya pada Tahun 2013 capaian kinerjanya) juga sebesar 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2014 sebanyak 48 (empat puluh delapan) Kantor Bersama Samsat yang dapat mempertahankan sertifikasi SMM (Sistem Manajemen Mutu) ISO 9001:2008.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

Tinjauan evaluasi atas kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dilakukan dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atas dasar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, rincian capaian indikator kinerja kunci tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014

NO	ASPEK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	RASIO CAPAIAN
1.	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	1 Program dari 4 Program Nasional	25%
		Keberadaan Standar Operasional Prosedur	6 SOP Pelayanan Samsat	100%
2.	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	0	-
3.	Penataan Kelembagaan Daerah	Rasio Struktur Jabatan dan eselonering yang terisi	160 Jabatan Terisi dari 161 Jabatan yang Tersedia	99%
		Keberadaan Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi SKPD	Tidak Ada	-
4.	Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Rasio PNS Provinsi	855 Personil dari 20.809 PNS Provinsi	4.11%
		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Diklat PIM	101 pejabat dari 160 pejabat yang ada	63.12%
		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	154 pejabat dari 160 pejabat yang ada	96.25%
5.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan	3 dokumen	100%

NO	ASPEK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	RASIO CAPAIAN
		Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja	6 Program dari 6 Program	100%
		Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam RKA	6 Program dari 6 Program	100%
		Jumlah Program Renja yang diakomodir dalam DPA	6 Program dari 6 Program	100%
6.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Rp 500.039.344.938 dari Rp20.957.372.617.799	2.39%
		Belanja Modal terhadap Total Belanja APBD	Rp 19.459.026.370 dari Rp500.039.344.938	3.89%
		Total Belanja Pemeliharaan dari Total Belanja Barang dan Jasa	Rp 36.887.776.134 dari Rp144.038.966.646	25.61%
		Total Belanja Pemeliharaan dari Total Belanja SKPD (realisasi)	Rp 36.887.776.134 dari Rp500.039.344.938	7.38%
		Keberadaan Laporan Keuangan SKPD (Neraca, Calk)	3 laporan	-
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keberadaan Inventarisasi Barang atau asset SKPD	4 dokumen	-
		Penggunaan Asset SKPD	Nilai Asset yg tidak digunakan : Rp 26.822.936.451 Nilai Asset yang dikuasai : Rp 455.543.570.511	5.89%

NO	ASPEK	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	RASIO CAPAIAN
8.	Pemberian Fasilitas Terhadap Partisipasi	Jumlah Fasilitas/ Prasarana Informasi	1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mass Media	-
		Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat di 46 KB Samsat	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, yang salah satunya adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas menyusun Kebijakan Teknis di Bidang Pendapatan dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpartisipasi langsung terhadap proses pengelolaan Pendapatan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Dalam perkembangannya, kebutuhan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan pembangunan selalu mengalami peningkatan.

Hal tersebut mengharuskan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur untuk selalu melakukan pengembangan terhadap Kebijakan Keuangan Daerah, yang diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, optimalisasi pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah serta Optimalisasi kontribusi BUMN.

Upaya Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah dilakukan melalui optimalisasi pemungutan Pajak Daerah. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Objek-Objek Pajak Daerah, tetapi dalam pelaksanaannya selama ini masih belum maksimal, seperti pada penetapan Kendaraan TNI/POLRI sebagai salah satu Objek Pajak Kendaraan Bermotor, yang pada saat ini masih belum bisa dipungut. Upaya Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, yang pada saat ini sudah terlaksana adalah Pemanfaatan aset-aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak perbankan dalam rangka untuk memanfaatkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tempat pemasangan lokasi ATM /space promosi.

Arah Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan berbagai upaya dalam rangka mengurangi jumlah Tunggakan (Piutang) Pajak Daerah yang cenderung mengalami peningkatan,
2. Melakukan Optimalisasi usaha Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
3. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,
4. Mengoptimalkan Pengelolaan serta Peran Aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka pemberian kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), berbagai upaya yang akan dilaksanakan adalah:

1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan dan penambahan layanan yang memudahkan dan mendekati masyarakat secara langsung yang memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta upaya penguatan kualitas pelayanan kelembagaan melalui lembaga-lembaga sertifikasi yang berkualifikasi seperti ISO. Khusus untuk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, diantaranya adalah pengembangan sistem informasi berbasis *text message* untuk menyampaikan kewajiban pemilik kendaraan bermotor, yang kedua adalah perawatan dan penyempurnaan operasional mesin Anjungan Tunai Mandiri Samsat. Khusus untuk peningkatan prasarana yang kurang memadai akan difokuskan pada perawatan/pemeliharaan Gedung Kantor Bersama Samsat di seluruh Jawa Timur,
2. Memanfaatkan sebesar-besarnya semua sumber daya sekaligus melakukan sinergi kelembagaan baik koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penerimaan dana perimbangan maupun dengan Kabupaten/ Kota terkait pengembangan penerimaan yang bersifat fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah,
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi dan keahlian.

2.3.1 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI

Secara umum, dapat diinformasikan beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur terkait dengan belum optimalnya tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

1. Tuntutan pemenuhan terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang tertentu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dengan cara penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian;
2. Laju pengurangan jumlah petugas pelayanan karena purna tugas dengan penambahan petugas baru tidak sebanding, sehingga dapat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, diperlukan penambahan jumlah petugas pelayanan sesuai dengan perhitungan kebutuhan jumlah SDM yang diperlukan.

3. Distribusi penempatan petugas pada UPT yang belum merata. Hampir seluruh UPT, kekurangan petugas di dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan penambahan jumlah petugas pada UPT yang kekurangan petugas;
4. Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang. Untuk mengurangi hal tersebut, maka diperlukan pembinaan kepada petugas pelayanan;
5. Beberapa prasarana pelayanan dalam kondisi yang kurang prima, khususnya terkait dengan usia pakai dan volume yang kurang memadai akibat bertambahnya pengguna layanan.
6. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait. Untuk itu, diperlukan koordinasi dengan instansi terkait di dalam peningkatan pemungutan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.2 TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENINGKATAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi target dan capaian kinerja Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui dengan melakukan analisis dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*).

***Strength* (Kekuatan)**

Adapun Unsur-unsur kekuatan (*Strength*) yang dapat dijadikan kelebihan dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dengan baik;
2. Jumlah unit pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang tersebar luas di Kabupaten/ Kota se Jawa Timur yang merupakan kepanjangan tangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan visi, misi serta tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

3. Layanan Samsat *Drive Thru* yang melakukan pembayaran PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan STNK setiap tahun tanpa harus turun dari kendaraan;
4. Layanan Samsat *Link* yang melakukan pembayaran PKB dan pengesahan STNKB setiap tahun dapat dilakukan dimana saja tanpa melihat domisili pemilik dan berlaku di seluruh Jawa Timur;
5. Samsat Keliling yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun melalui loket pada kendaraan Samsat Keliling yang ditempatkan di tempat-tempat strategis di lokasi yang jauh dari KB. Samsat;
6. Layanan Samsat *Payment Point* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada tempat yang strategis;
7. Layanan Samsat *Delivery* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun menggunakan kendaraan bermotor berdasarkan permintaan yang disampaikan melalui *Call Center*;
8. Layanan Samsat *Corner* yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun yang ditempatkan pada *Plaza/Mall*;
9. Layanan Samsat *Quick Response* (SQR) dengan menggunakan kendaraan roda dua.
10. Layanan pengesahan STNK dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) melalui *e-Channel Bank* yaitu *internet banking*, ATM atau *Mobile Banking*.

11. Layanan Anjungan Tunai Mandiri Samsat sebagai layanan baru untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor sekaligus melakukan pengesahan STNK Tahunan dalam satu mesin yang sama.
12. Layanan pencetakan Bukti Bayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengesahan STNK melalui mesin embosser, sebagai pelengkap layanan e-Samsat.

Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, terdapat kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang tertentu;
2. Berkurangnya jumlah petugas pelayanan;
3. Distribusi penempatan petugas pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur belum merata;
4. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Respon dan daya tanggap terhadap keluhan Pelayanan Publik masih kurang.

Opportunity (Peluang)

Beberapa peluang (*Opportunities*) yang dimiliki Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Iklim investasi di Jawa Timur yang semakin kondusif;
2. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik;
3. Semakin banyaknya jumlah Kendaraan Bermotor (yang berasal dari provinsi lain) beroperasi di Jawa Timur dapat mendatangkan potensi penerimaan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
4. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;
5. Rasio kepemilikan kendaraan bermotor dengan jumlah penduduk di Jawa Timur masih rendah, dan berpeluang untuk terus tumbuh ;
6. Perkembangan dinamika nasional dan internasional.

Threat (Ancaman)

Adapun beberapa ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dan harga Bahan Bakar Minyak berakibat pada instabilitas kondisi ekonomi makro, sehingga berpengaruh kepada daya beli masyarakat dan juga berdampak kepada penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2. Implementasi regulasi tentang tarif bea masuk untuk barang impor membuat harga jual kendaraan akan semakin mahal;
3. Laju penambahan infrastruktur jalan raya tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor;
4. Masih banyaknya Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Provinsi Jawa Timur yang berasal dari provinsi lain yang belum melakukan Pendaftaran Ulang ke wilayah Provinsi Jawa Timur (Mutasi);
5. Fluktuasi kondisi ekonomi makro mempengaruhi prioritas pengeluaran pendapatan sebagian wajib pajak yang lebih mengedepankan konsumsi rumah tangga, sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan bermotor.

2.3.3 FORMULASI ISU-ISU PENTING

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan, sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Teknologi informasi dan komunikasi memastikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan tersebut dan menyikapi kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan untuk memfasilitasi penyusunan Raperda APBD/Perubahan APBD rencana program dan kegiatan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk berbagai isu strategis antara lain:

1. Peningkatan PAD;
 - a. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah;
 - b. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen, pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab;
 - c. Pengembangan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - d. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan yang Sah;
 - e. Peningkatan hubungan kerjasama antar Dinas di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah.

2. Pelayanan Publik;
 - a. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan.
3. Peningkatan Kelembagaan dan SDM
Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Jenis Pajak Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok, serta Retribusi Jasa Usaha serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimana sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menambah jenis pajak baru (*closed list*), sehingga terhadap Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi perlu dilakukan kebijakan-kebijakan efisiensi dan keadilan.

Pelaksanaan kebijakan efisiensi yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberikan kemudahan persyaratan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk pengesahan STNK tanpa melampirkan BPKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor,
2. Mendekatkan Layanan kepada Wajib Pajak melalui pengembangan Samsat Keliling, Samsat *Payment Point*, Samsat Kepulauan, Samsat Pembantu, e-Samsat dan ATM Samsat, dengan mengembangkan penggunaan layanan berbasis Teknologi Informasi.

Pelaksanaan nilai keadilan yang dilaksanakan antara lain:

1. Memberitahukan kepada Wajib Pajak terkait kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengirimkan notifikasi secara elektronik untuk memberitahukan kewajiban pemilik Kendaraan Bermotor 14 hari sebelum masa pajaknya berakhir,
2. Melakukan Pengenaan Pajak Progresif terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis penumpang milik pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya dan roda 2 (dua) dengan isi silinder lebih dari 250 cc,
3. Menerapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 50% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan roda 2 (dua) yang usianya di atas 25 (dua puluh lima tahun) tahun,
4. Memberikan Pengurangan Pajak terhadap Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sebesar 40% dan Kendaraan Angkutan Barang Umum sebesar 20% yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur untuk waktu yang telah ditentukan,
5. Memberikan Insentif Pajak berupa keringanan, pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selain itu inovasi-inovasi pelayanan publik dan pemberian kemudahan-kemudahan persyaratan bagi pembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya kedepan adalah pengembangan pelayanan yang lebih mendekati masyarakat dengan pendirian Samsat *Payment Point* yang bekerja sama dengan pihak lain di seluruh pelosok Jawa Timur, dengan upaya tersebut diharapkan dapat memberi pesan positif terhadap kesadaran masyarakat Jawa Timur untuk melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah.

Selain itu juga Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi antara lain:

- *Homepage* yaitu : <http://www.dipendajatim.go.id>

Layanan melalui *website*, masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur ataupun informasi lain yang berkaitan dengan prosedur pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), *link* ke berbagai industri otomotif yang ada, info Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) berbagai *type* dan tahun pembuatan,

- *e-Samsat* Jatim atau *e-Banking* merupakan pelayanan 24 Jam secara *online* di Jawa Timur yang saat ini telah bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI,

- *SMS Info* PKB

Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui SMS,

- *SMS* Komplain

Menampung keluhan Wajib Pajak melalui SMS tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan dan atau pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- *ATM* Samsat

Layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan sekaligus Pengesahan STNK dengan metode *self service* yang ditempatkan pada beberapa lokasi strategis.

Strategi dan Kebijakan untuk Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Perluasan dan peningkatan sumber Penerimaan dan Pembiayaan Daerah serta mendorong peningkatan tertib Administrasi Keuangan Daerah;
2. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
3. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware* dan *software*) sebagai pendukung utama kelembagaan;
5. Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan, Pengembangan Manajemen Pendapatan Daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggungjawab;

6. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ;
8. Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan Kabupaten/Kota di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah ;
9. Peningkatan Hubungan Kerja/kerjasama antar Dinas di lingkungan Provinsi Jawa Timur dan dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka peningkatan penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan target kinerja dan program/kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 berpedoman kepada kerangka perencanaan strategis yang telah dicanangkan pada Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019, dimana tahun 2016 merupakan perencanaan tahun kedua dari rencana lima tahunan yang telah ditetapkan. Selain mengacu kepada dokumen perencanaan strategis tersebut, rencana kerja tahun 2016 juga berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas Gubernur Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mendukung pelaksanaan misi ke empat yaitu meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean governance*) serta profesionalisme pelayanan publik. Untuk dapat mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Timur melalui pelaksanaan misi keempat tersebut, maka diperlukan sinkronisasi agenda prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan agenda prioritas yang direncanakan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tercapainya Peningkatan PAD dan Pelayanan Publik yang Berkualitas		85.615.138	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tingkat Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	46,09%	67.652.750	
								Tingkat Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	45%		
								Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88		
								Jumlah Ruang Lingkup/Jenis Pelayanan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008	1		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Jumlah Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	30%		
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	35 UPTD di Jawa Timur	Terlaksananya Kegiatan Penggalan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Dokumen	203.080	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Dokumen Kegiatan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	35 Dokumen	447.699	
2	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	35 UPTD di Jawa Timur	Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan; Terlaksananya Bimtek Perpajakan	-	3.169.228	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan; Jumlah Kegiatan Bimtek Pajak	11 keg dan 3 keg	4.867.560	
3	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	35 UPTD di Jawa Timur	Terselenggaranya kegiatan koordinasi /evaluasi terkait penerimaan dana bagi hasil pajak dan pendapatan daerah lainnya	-	512.564	Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Evaluasi Terkait Penerimaan DBH Pajak dan Pendapatan Lainnya	22 Kab/Kota	1.055.487	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	35 UPTD di Jawa Timur	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi	2 Instansi	133.530	Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi	2 Instansi	132.637	
5	Retribusi Tempat Pelelangan	35 UPTD di Jawa Timur	Terselenggaranya Kegiatan Lelang Kayu Hasil Hutan	-	220.040	Retribusi Tempat Pelelangan	7 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Lelang Kayu Hasil Hutan	70 Kegiatan Lelang	599.218	
6	Peningkatan Pelayanan Publik	35 UPTD	Jumlah Dokumen Surveillance	-	8.475.265	Peningkatan Pelayanan Publik	35 UPTD, 46 KB Samsat	Jumlah Dokumen Surveillance	51 dokumen	5.907.444	
7	Peningkatan Kinerja Pelayanan	35 UPTD di Jawa Timur	Tersusunnya Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		2.201.875	Peningkatan Kinerja Pelayanan	46 KB Samsat di Jawa Timur	Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	9 dokumen	34.512	
8	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	35 UPTD di Jawa Timur	Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPh dan Pasal 21	-	133.702	Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21	10 Kab/Kota	127.691	
9	Pengembangan Pusat dan Pengolahan Data	35 UPTD di Jawa Timur	Tersedianya Hardware Pendukung Kinerja SKPD	6 unit	1.085.500	Pengembangan Pusat dan Pengolahan Data	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Hardware Pendukung Peningkatan PAD	6 unit	2.811.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Analisis dan Evaluasi Kinerja	35 UPTD di Jawa Timur	Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Dokumen	2.725.463	Analisis dan Evaluasi Kinerja	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	70 Dokumen	1.927.470	
11	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	35 UPTD di Jawa Timur	Tersusunnya Kertas Kerja Koordinasi dan Intensifikasi	-	218.050	Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Kertas Kerja Koordinasi dan Intensifikasi	12 dokumen	426.155	
12	Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	35 UPTD di Jawa Timur	Tersusunnya Dokumen Kegiatan Rekonsiliasi	5 dokumen	425.140	Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	Surabaya	Jumlah Dokumen Kegiatan Rekonsiliasi	5 dokumen	770.895	
13	Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB Samsat dan UPTD	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Sumberdaya Aparatur Dipenda yang Kompeten	105 orang	399.180	Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB Samsat dan UPTD	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Sumberdaya Aparatur yang Kompeten	105 orang	425.380	
14	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	35 UPTD di Jawa Timur	Tersedianya Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan	46 server dan 10 ATM Samsat	9.807.320	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan	46 server dan 10 ATM Samsat	1.076.960	
15	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Timur	Surabaya	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.911.394	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Timur	Kota Surabaya	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur	100%	648.910	
16	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Utara	Surabaya	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.802.899	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Utara	Kota Surabaya	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara	100%	550.694	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
17	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Selatan	Surabaya	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.228.166	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Selatan	Kota Surabaya	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan	100%	500.996	
18	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Barat	Surabaya	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.909.394	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Surabaya Barat	Kota Surabaya	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat	100%	668.738	
19	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sidoarjo	Sidoarjo	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	2.226.668	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sidoarjo	Kab Sidoarjo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo	100%	920.610	
20	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Mojokerto	Mojokerto	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	2.479.356	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Mojokerto	Mojokerto Kab dan Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto	100%	734.667	
21	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Gresik	Gresik	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.8433.955	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Gresik	Kab Gresik	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik	100%	569.562	
22	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Jombang	Jombang	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.852.533	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Jombang	Kab Jombang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang	100%	652.492	
23	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Bojonegoro	Bojonegoro	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.436.715	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Bojonegoro	Kab Bojonegoro	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro	100%	591.009	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Tuban	Tuban	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.332.127	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Tuban	Kab Tuban	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban	100%	591.248	
25	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Lamongan	Lamongan	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.257.912	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Lamongan	Kab Lamongan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan	100%	632.108	
26	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Ngawi	Ngawi	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.815.993	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Ngawi	Kab Ngawi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi	100%	588.579	
27	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Madiun	Madiun	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	3.326.177	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD madiun	Madiun Kab dan Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun	100%	675.101	
28	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Magetan	Magetan	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	963.183	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Magetan	Kab Magetan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan	100%	484.680	
29	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Ponorogo	Ponorogo	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.580.731	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Ponorogo	Kab Ponorogo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo	100%	536.999	
30	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Pacitan	Pacitan	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.109.887	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Pacitan	Kab Pacitan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan	100%	529.025	
31	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Kediri	Kediri	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.978.117	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Kediri	Kediri Kab dan Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri	100%	959.969	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
32	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Tulungagung	Tulungagung	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	100%	1.373.457	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Tulungagung	Kab Tulungagung	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung	100%	484.799	
33	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Trenggalek	Trenggalek	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	100%	1.093.909	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Trenggalek	Kab Trenggalek	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek	100%	452.944	
34	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Nganjuk	Nganjuk	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	100%	1.511.718	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Nganjuk	Kab Nganjuk	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk	100%	510.636	
35	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Kota	Malang	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.558.916	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Kota	Kota Malang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota	100%	678.557	
36	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Selatan	Malang	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.418.311	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Selatan	Kab Malang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan	100%	648.556	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Utara dan Batu Kota	Malang	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.488.840	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Malang Utara dan Batu Kota	Kab Malang dan Kota Batu	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota	100%	585.182	
38	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Blitar	Blitar	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.824.360	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Blitar	Blitar Kab dan Kota	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar	100%	719.423	
39	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Probolinggo	Probolinggo	Tercapainya Target PAD; Peningkatan % Kontribusi thd Target PAD UPT;	12.610.412.850; 100%; 100%	1.889.548	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Probolinggo	Kab Probolinggo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo	100%	634.898	
40	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Lumajang	Lumajang	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.455.395	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Lumajang	Kab Lumajang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang	100%	483.271	
41	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Pasuruan	Pasuruan	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.555.595	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Pasuruan	Kab dan Kota Pasuruan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan	100%	727.305	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
42	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Situbondo	Situbondo	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.366.248	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Situbondo	Kab Situbondo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo	100%	453.621	
43	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Jember	Jember	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.711.085	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Jember	Kab Jember	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember	100%	797.133	
44	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Bondowoso	Bondowoso	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.261.855	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Situbondo	Kab Bondowoso	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso	100%	605.782	
45	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Banyuwangi	Banyuwangi	Kelancaran Kinerja Aparatur dalam mencapai target UPT	-	1.592.722	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Situbondo	Kab Banyuwangi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi	100%	657.238	
46	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Pamekasan	Pamekasan	Peningkatan Persentase Kontribusi thd Target PAD UPT	100%	1.240.111	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Situbondo	Kab Pamekasan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan	100%	555.349	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
47	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Bangkalan	Bangkalan	Peningkatan Persentase Kontribusi thd Target PAD UPT	100%	1.095.282	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Bangkalan	Kab Bangkalan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan	100%	422.063	
48	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sampang	Sampang	Peningkatan Persentase Kontribusi thd Target PAD UPT	100%	1.036.184	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sampang	Kab Sampang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang	100%	454.252	
49	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sumenep	Sumenep	Peningkatan Persentase Kontribusi thd Target PAD UPT	100%	1.176.463	Pengembangan Kinerja Pelayanan Pada UPTD Sumenep	Kab Sumenep	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep	100%	410.510	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran		26.339.7453	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	60.126.315	
50	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	35 UPTD di Jawa Timur dan Kantor Dinas	Peningkatan Kepuasan Masyarakat/ Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	26.339.453	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	35 UPTD di Jawa Timur dan Kantor Dinas	Jumlah Surat Perpajakan yang Tersedia	12 bulan	60.126.315	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tercapainya Peningkatan PAD dan Pelayanan Publik yang berkualitas		75.717.964	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Presentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi	100%	82.161.114	
51	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	35 UPTD, 48 KB Samsat di Jawa Timur dan Kantor Dinas	Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana		61.282.123	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	35 UPTD, 48 KB Samsat di Jawa Timur dan Kantor Dinas	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	100%	54.144.064	
52	Pemereliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	35 UPTD, 48 KB Samsat di Jawa Timur dan Kantor Dinas	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	100%	14.435.841	Pemereliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	35 UPTD, 48 KB Samsat di Jawa Timur dan Kantor Dinas	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	28.017.050	
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah				10.894.396	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah		Persentase Kelembagaan Yang Tepat Fungsi	100%	34.063.373	
53	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	35 UPTD di Jawa Timur	Terciptanya koordinasi dlm rangka mendukung kinerja kelembagaan	90 orang	1.225.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Surabaya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan	90 orang	2.110.334	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
54	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35 UPTD di Jawa Timur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur di Dipenda Prov Jatim	100%	9.669.396	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kantor Dinas dan 35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis	100%	31.953.039	
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan				1.612.673	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang tepat waktu		992.037	
55	Penyusunan Dokumen Perencanaan	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	7 dokumen	714.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kantor Dinas (Surabaya)	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	7 dokumen	420.561	
56	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	35 UPTD di Jawa Timur	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	4 dokumen	619.794	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Kantor Dinas (Surabaya)	Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun	4 dokumen	292.596	
57	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	35 UPTD di Jawa Timur	Tersusunnya Sistem Informasi data yang Termutakhir	100%	278.880	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Kantor Dinas (Surabaya)	Tersusunnya Sistem Informasi data yang Termutakhir	100%	278.880	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan tolok ukur pada Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung proses Pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis seperti yang terdapat di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Tujuan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan terwujudnya Pelayanan Publik yang baik, dengan azas transparansi, akuntabilitas, kondusional, partisipatif, kesamaan keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, maka perlu dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*). Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan

setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Rumusan Tujuan Strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.

Secara lebih terinci tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara yang dimiliki dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan guna mendukung pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta mewujudkan sebuah pelayanan yang baik dengan berdasarkan pada azas transparan, yaitu semua biaya secara transparan dan tanpa ada biaya pemungutan lainnya, dengan rincian yang detail dan jelas, serta kondisional yaitu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat/Wajib Pajak dan memberikan pelayanan yang sama dengan tidak membeda-bedakan dalam pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategisnya, dan setiap tujuan strategis yang ditetapkan diperlukan indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2014-2019), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan (seperti yang tersebut di atas), yaitu :
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Sasarannya sebagai berikut:

- a. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Jawa Timur,
- c. Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
- d. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,
- e. Nilai Rata-Rata Indek Kepuasan Masyarakat (IKM),

f. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur selalu melakukan peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang telah berjalan dan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pencapaian realisasi terhadap Indikator Kinerja Utama, yang terdiri dari :

1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah,
3. Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,
5. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
6. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan.

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		Target 2016
Uraian		Uraian	Indikator Kinerja	
	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,6%
			2. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	60%
			3. Persentase Penurunan Piutang/Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	30%
			4. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88%
			5. Rata-Rata Nilai IKM	88
			6. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Unggulan	43%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2016 sebanyak 5 (lima) Program dengan program prioritas/utama yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah). Rincian uraian Kegiatan untuk tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1 lampiran, sedangkan Program-program tersebut antara lain:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
5. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengalokasian sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan untuk menghasilkan output dalam bentuk barang dan atau jasa.

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program prioritas atau program utama Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2016 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 50.727.533.290,00 terdiri atas:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah sebesar Rp 179.586.650,00
2. Peningkatan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 8.205.110.000,00

3. Kerjasama pengembangan pendapatan daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait sebesar Rp 3.603.321.890,00
4. Kerjasama dengan sektor Publik/BUMN dan pengembangan sharing pendapatan (*profit/revenue sharing*) dan manajemen pelayanan publik (*benchmarking*) sebesar Rp 67.657.500,00
5. Retribusi Tempat Pelelangan Rp 2.416.703.000,00
6. Peningkatan pelayanan publik sebesar Rp 7.545.495.000,00
7. Peningkatan kinerja pelayanan sebesar Rp 25.000.000,00
8. Sosialisasi sistem dan prosedur pemungutan pajak pusat sebesar Rp 93.834.000,00
9. Pengembangan pusat pengolahan data sebesar Rp 2.860.250.000,00
10. Analisis dan evaluasi kinerja sebesar Rp 1.691.080.000
11. Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah sebesar Rp 242.705.250,00
12. Pengelolaan Data Pendapatan Daerah Rp 2.318.820.000,00
13. Peningkatan Kompetensi pranata komputer KB. Samsat dan UPTD sebesar Rp 247.630.000,00
14. Pengembangan teknologi sistem informasi dan komunikasi di KB. Samsat dan UPTD sebesar Rp 2.652.340.000,00.
15. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur Rp 530.800.000,00
16. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara Rp 530.800.000,00
17. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan Rp 530.800.000,00
18. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat Rp 530.800.000,00
19. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo Rp 530.800.000,00
20. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto Rp 530.800.000,00

21. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik Rp 530.800.000,00
22. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang Rp 530.800.000,00
23. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro Rp 530.800.000,00
24. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban Rp 530.800.000,00
25. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan Rp 530.800.000,00
26. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi Rp 530.800.000,00
27. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun Rp 530.800.000,00
28. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan Rp 530.800.000,00
29. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo Rp 530.800.000,00
30. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan Rp 530.800.000,00
31. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri Rp 530.800.000,00
32. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung Rp 530.800.000,00
33. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek Rp 530.800.000,00
34. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk Rp 530.800.000,00
35. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota Rp 530.800.000,00
36. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan Rp 530.800.000,00

37. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota Rp 530.800.000,00
38. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar Rp 530.800.000,00
39. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo Rp 530.800.000,00
40. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang Rp 530.800.000,00
41. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan Rp 530.800.000,00
42. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo Rp 530.800.000,00
43. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Rp 530.800.000,00
44. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso Rp 530.800.000,00
45. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi Rp 530.800.000,00
46. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan Rp 530.800.000,00
47. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan Rp 530.800.000,00
48. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang Rp 530.800.000,00
49. Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep Rp 530.800.000,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 merupakan rencana tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur seperti yang tertuang dalam Rencana Strategisnya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dan untuk *me-review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana masa depan yang sesuai dengan urutan pilihan serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga merupakan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai salah satu alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk antara lain:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan;
- b. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- c. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, diharapkan dapat terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, sinergis dan berkelanjutan serta terwujudnya komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan instansi/lembaga terkait yang membidangi fungsi lain.

Akhirnya, dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Program dan Kegiatan serta dokumen ini harus menjadi acuan dalam proses perencanaan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun berikutnya baik dalam rangka penyusunan KUA/PPAS, penyusunan RKA/DPA maupun penetapan strategi dan kebijakan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016.

Surabaya, Juli 2015

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661031 199011 1 001

